

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki sumber pendanaan utama bagi negara yaitu salah satunya didapatkan melalui perpajakan. Semakin bertambahnya masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun menjadi sebuah tantangan serta tanggung jawab yang besar bagi negara untuk terus memaksimalkan upayanya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak memainkan peranan yang cukup penting dalam membantu Indonesia mencapai pemerataan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pajak membiayai berbagai kegiatan seperti pembangunan infrastruktur dari pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah, penyediaan transportasi publik yang memadai, hingga bidang keamanan bagi bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak adalah

“Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Undang-Undang memberikan penjelasan bahwa pajak dipungut secara paksa serta imbalan yang didapatkan oleh masyarakat tidak akan dirasakan secara langsung. Sehingga di dalam praktiknya, banyak dijumpai wajib pajak yang melakukan penyembunyian terhadap kewajiban perpajakannya yang dimana seharusnya mereka laporkan kepada negara atau tindakan tersebut disebut dengan penggelapan pajak (Pohan, 2014). Dengan adanya peraturan tersebut, memunculkan berbagai macam spekulasi atau persepsi dari masyarakat yang berbeda-beda

mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) masih menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan, terlebih mengenai aspek etika praktik yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang menarik di kalangan para ahli. Beberapa pandangan terhadap etika penggelapan pajak adalah sebagai berikut, pandangan pertama mengatakan bahwa penggelapan pajak tidak pernah etis. Tiga alasan yang mendasari sudut pandang tersebut, yaitu karena adanya kewajiban kepada Tuhan, kewajiban kepada negara serta kepada masyarakat. Pandangan kedua mengatakan bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis, dasar alasan dari pandangan tersebut ialah karena seluruh pemerintah tidak layak mendapatkan atau menerima pembayaran pajak dari masyarakat. Kemudian pada pandangan ketiga mengatakan bahwa penggelapan pajak mungkin saja bisa dikatakan sebagai tindakan etis jika dilihat dari beberapa kasus, keadaan, atau fakta yang ada (McGee, 2006).

Cohn (1998), McGee (2008) dalam penelitiannya terhadap komunitas Yahudi menemukan hasil bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dianggap sebagai tindakan yang tidak pernah etis bagi komunitas mereka. Menurut Cohn (1998), Yahudi memiliki aturan-aturan dan perintah yang wajib di taati serta dijalankan oleh setiap individu di dalam komunitasnya dengan tujuan menjaga tindakan mereka agar tidak merugikan serta membawa dampak buruk terhadap komunitas mereka.

Penelitian lainnya dilakukan untuk menemukan beberapa alasan, pendapat serta argumen mengenai persepsi penggelapan pajak yang mungkin saja bisa dikatakan sebagai tindakan etis maupun tidak etis dari beberapa kasus. Penelitian terhadap mahasiswa di Bosnia (McGee et al, 2006), Tiongkok (McGee et al, 2007), Hongkong dan Amerika (McGee et al, 2017) mengungkap bahwa beberapa alasan atau argumen seperti tindakan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, dana yang dikumpulkan dihabiskan untuk proyek-proyek yang tidak disetujui oleh masyarakat

serta adanya pelanggaran dalam hak asasi manusia menjadi sebuah alasan atau argument terkuat yang mendasari bahwa dalam beberapa kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) dianggap sebagai tindakan etis.

Persepsi yang berbeda-beda di setiap individu dalam melihat, menilai dan melakukan suatu tindakan didasarkan pada pengaruh internal serta eksternal dari individu. Dalam menanggapi permasalahan mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) yang masih menjadi topik pembahasan yang menarik terlebih jika berkaitan dengan etika dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dari internal atau dalam diri manusia seperti religiusitas, *machiavellian*, serta nasionalisme yang dimiliki atau terdapat oleh seseorang.

Dewanta dan Machmuddah (2019) mengatakan bahwa perilaku etis seseorang tidak terlepas dari faktor religiusitas mereka. Di Indonesia, religiusitas masih sangatlah kental keberadaanya serta dipercaya menjadi pendorong seseorang untuk menumbuhkan sifat serta tuntunan kepada individu untuk menghindari perilaku buruk di kehidupannya. Religiusitas masih memegang peranan penting di negara ini, hal tersebut terbukti melalui adanya peletakan Ketuhanan pada Pancasila di sila pertama sebagai dasar negara (Panggabean, Titra, dan Murniati, 2014). Ajaran dan nilai Ketuhanan dari agama dan budaya dipandang berakar erat pada kehidupan bangsa Indonesia.

Religiusitas dipecah menjadi dua bagian atau dimensi yaitu religiusitas ekstrinsik serta religiusitas intrinsik (Allport & Ross, 1967). Religiusitas ekstrinsik adalah sebuah kondisi dimana seseorang menerapkan atau menggunakan agama sebagai cara untuk menggapai atau mencapai tujuan tertentu. Seseorang dengan religiusitas ekstrinsik akan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan nilai keagamaan tetapi tidak berdasar pada keyakinan yang dimiliki terhadap keagamaannya, melainkan didasarkan pada pengharapan tujuan lain seperti pengakuan derajat

status sosial, kejayaan, jabatan, serta ke inginan pribadi dari orang tersebut. Kesalehan orang tersebut tidak benar adanya dari dalam diri mereka, melainkan hanya sebagai cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Berbeda dengan seorang individu yang menerapkan dan menghayati religiusitas intrinsik, individu tersebut akan cenderung menganggap iman atau keyakinannya sebagai nilai tertinggi, karena terdapat komitmen pada dirinya terhadap kepercayaan atau ke agamaan yang di anutnya. Seorang dengan religiusitas intrinsik akan melakukan aktivitas kereligiusan mereka tanpa adanya dorongan dari eksternal sebagai bentuk dari penghayatan, keseriusan, dan komitmen yang mereka tunjukkan melalui tindakan sehari-hari. Keyakinan, kebiasaan serta aktivitas kehidupan sehari-hari mereka didasarkan pada pandangan bahwa kereligiusan memiliki nilai yang paling penting dalam kehidupan pribadi mereka. (Feoh, 2016).

Perilaku moral baik seseorang dapat ditanamkan sedari kecil, dalam hal ini salah satu contohnya adalah dengan menumbuhkan rasa cinta terhadap negara. Rasa cinta terhadap negara tersebut disebut dengan nasionalisme. Nasionalisme merupakan paham, ajaran, dan pandangan dimana seseorang memiliki rasa yang besar untuk mencintai bangsa dan negara mereka. Nasionalisme didefinisikan sebagai suatu keadaan pikiran dimana sebuah rasa kesetiaan tertinggi individu terletak pada kecintaan pada negara (Kohn, 1965). Sadikin (2008) mengungkapkan bahwa rasa nasionalisme merupakan suatu sikap yang ditunjukkan oleh seorang pribadi dalam mencintai tanah air, bangsa dan negara sebagai suatu bentuk dari partisipasi dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa yang di-ikat oleh sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai bentuk persatuan atau kemerdekaan nasional dengan prinsip kebebasan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nasionalisme dianggap sebagai faktor yang baik bagi negara sebab dipandang dapat menjadi faktor penurun angka penggelapan pajak di Indonesia. Rahayu (2010),

(Setiana, et al., 2010) mengatakan bahwa “rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan”. Pernyataan tersebut mendorong opini bahwa rasa nasionalisme yang tinggi pada seseorang dapat dimungkinkan menjadi salah satu tolak ukur untuk menurunkan adanya kasus penggelapan pajak (tax evasion).

Di sisi lain, terdapat sifat negatif dari diri manusia yang dipercayai dapat mendorong individu untuk berperilaku tidak etis, yaitu sifat *machiavellian*. Sifat *machiavellian* merupakan sebuah kecenderungan dimana seseorang akan berperilaku tidak etis, sering berbohong, dan dapat dikatakan manipulatif. Individu dengan sifat *machiavellian* diduga akan melakukan segala cara untuk meraih tujuannya yang akan menguntungkan dirinya, meskipun tindakan tersebut harus bertentangan dengan etika moral yang berlaku, dan tidak jarang pula tindakannya akan merugikan orang lain. Semakin tinggi sifat dan sikap *machiavellian* yang ada pada diri seseorang maka diduga akan tinggi pula tindak penggelapan pajak yang akan terjadi. Dikatakan demikian karena seorang individu dengan sikap *machiavellian* cenderung memiliki pemikiran bahwa melakukan penggelapan pajak merupakan sebuah tindakan yang etis, karena kepribadiannya yang cenderung mengabaikan nilai moral demi menguntungkan dirinya sendiri (Asih & Dwiyanti, 2019).

Mahasiswa merupakan aset penting bagi negara serta dianggap sebagai bakal penerus yang akan melakukan kemajuan serta pembaharuan demi keberlanjutan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Penting adanya bagi mahasiswa sebagai penerus bangsa dan negara ini untuk memiliki karakteristik, sifat dan moral yang baik. Ketika memasuki dunia kerja, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memiliki karakter etika yang baik, tetapi perlu juga untuk membawa dan mempertahankan perilaku moral etis mereka di lingkungan mereka. Maraknya kasus pelanggaran yang menyangkut etika profesi sebagai akuntan dewasa ini, menjadi perhatian khusus peneliti

untuk melihat lebih dalam mengenai terhadap seberapa etis mahasiswa dalam menanggapi sebuah kasus yang berkaitan dengan pelanggaran etika, dalam hal ini penggelapan pajak (tax evasion).

Peneliti memilih mahasiswa akuntansi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendapatkan mata kuliah perpajakan dalam bisnis, kewarganegaraan serta etika bisnis sebagai obyek penelitian karena diyakini bahwa mahasiswa telah memiliki pemahaman yang baik dan masih hangat mengenai penggelapan pajak sehingga diharapkan mampu memberikan jawaban yang paling memadai. Dengan bermodalkan dasar karakter moral yang baik, mahasiswa dipercaya dapat menekan tingkat pertumbuhan tindak pelanggaran etika, dalam hal ini penggelapan pajak, serta diharapkan juga untuk mampu mendorong mereka menjadi calon wajib pajak atau pelaku pajak yang patuh, menaati aturan dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bagi bangsa dan negara, seperti penggelapan pajak.

Penelitian pendahulu yang dilakukan oleh (Budiarto, 2017) mendapatkan hasil bahwa religiusitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *machiavellian* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Tetapi kemudian ditemukan adanya perbedaan yang signifikan mengenai penghindaran pajak berdasarkan gender. Keyakinan yang dipegang oleh seseorang, dalam hal ini adalah religiusitas dipercayai mampu memberikan pengaruh yang baik bagi setiap individu dalam menentukan tindakannya disetiap kehidupannya.

Penelitian dilakukan oleh (Nurmilah et al., 2023) mendapatkan hasil bahwa nasionalisme dapat membawa dampak yang positif, dalam hal ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya. Hal tersebut membawa dampak yang positif bagi negara, karena dengan kepatuhan pajak yang meningkat, pendapatan negara pun akan meningkat, sehingga diharapkan mampu membawa bangsa dan negara kepada taraf kehidupan yang lebih baik dan

sejahtera.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Sari et al., 2023) mendapatkan hasil pengujian hipotesis yaitu pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perspektif etis penggelapan pajak. Love of Money berpengaruh positif signifikan terhadap perspektif etika penggelapan pajak. *Machiavellian* berpengaruh positif signifikan terhadap perspektif etis penggelapan pajak, namun religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan, cinta uang, dan *machiavellian* tentang perspektif etis penggelapan pajak.

Melihat adanya keterbatasan, penelitian ini bertujuan untuk menambah perspektif baru serta sebagai analisa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apakah terdapat pengaruh dari faktor yang berasal dari internal manusia terhadap adanya tindak penggelapan pajak. Pemilihan variabel pada penelitian ini didasarkan dari beberapa penelitian pendahulu diatas, serta sebagai sebuah replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Atmoko, (2022) yang menemukan hasil bahwa religiusitas intrinsik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, religiusitas ekstrinsik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan *machiavellian* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Serta tujuannya untuk mengisi *research gap* yang masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti mengenai akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan. Hal yang menjadi pembeda pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah dengan adanya penambahan pada variabel independen yaitu nasionalisme.

Pemilihan variabel dalam penelitian ini didasarkan oleh beberapa alasan tertentu. Pertama peneliti melihat bahwa penelitian di dalam akuntansi tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga melibatkan pemahaman perilaku manusia dan sosial. Perpajakan, misalnya, melibatkan keputusan etis dan moral, sehingga faktor-faktor seperti religiusitas dan nasionalisme relevan karena dapat memengaruhi pandangan seseorang terhadap penggelapan pajak.. Variabel seperti

religiusitas, nasionalisme, dan *machiavellian* mempengaruhi pengambilan keputusan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akuntansi. Pengambilan keputusan akuntansi tidak hanya didasarkan pada logika atau aturan teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi dan sosial. Pajak sering kali dipandang sebagai kewajiban moral, serta bukan hanya kewajiban hukum saja. Penggelapan pajak adalah fenomena yang melibatkan banyak dimensi, tidak hanya aspek keuangan tetapi juga aspek hukum, moral, dan sosial. Variabel seperti religiusitas dan nasionalisme bisa menjelaskan fenomena ini dari perspektif yang lebih luas, yang pada akhirnya membantu menjelaskan perilaku Wajib Pajak. Penggunaan variabel non-akuntansi memungkinkan peneliti untuk mengambil pendekatan yang lebih holistik dalam memahami perilaku manusia terkait dengan akuntansi, terutama dalam hal pajak. Hal tersebut dipandang mampu untuk memperkaya literatur akuntansi dengan sudut pandang perilaku yang lebih luas, melibatkan aspek moral, etis, dan sosial. Di dalam mata kuliah akuntansi berperilaku mempelajari bagaimana faktor psikologis, sosial, dan perilaku mempengaruhi pengambilan keputusan akuntansi. Variabel-variabel seperti religiusitas, nasionalisme, dan *machiavellian* sangat relevan dalam mata kuliah ini karena menunjukkan bagaimana karakteristik individu berperan dalam keputusan akuntansi yang berkaitan dengan etika, terutama dalam hal perpajakan. Akuntansi berperilaku berfokus pada bagaimana orang membuat keputusan yang terkait dengan laporan keuangan, seperti contoh dalam penggelapan pajak adalah memanipulasi angka pajak. Dalam konteks ini, sifat *machiavellian* dapat menjelaskan mengapa individu tertentu lebih cenderung terlibat dalam tindakan yang tidak etis. Dalam praktik akuntansi, pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada data finansial, tetapi juga pada faktor moral, sosial, dan kepribadian. Studi ini memberikan wawasan bagi para akuntan dan pembuat kebijakan tentang bagaimana meningkatkan kepatuhan pajak dan menurunkan adanya tindak penggelapan pajak dengan mempertimbangkan aspek-aspek non-

teknis.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mengangkat topik penelitian dengan judul **“Pengaruh Religiusitas intrinsik, Religiusitas ekstrinsik, Nasionalisme, dan Machiavellian terhadap Penggelapan pajak menurut Pandangan Mahasiswa”**. Penelitian ini diharapkan mampu memberi dukungan kontribusi terhadap pendidikan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak menggunakan TPB (*Theory Planned of Behavior*) sebagai dasar teori. Diharapkan juga penelitian ini mampu digunakan sebagai acuan atau panduan serta referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas intrinsik seseorang berpengaruh terhadap persepsinya tentang penggelapan pajak?
2. Apakah religiusitas ekstrinsik seseorang berpengaruh terhadap persepsinya tentang penggelapan pajak?
3. Apakah nasionalisme seseorang berpengaruh terhadap persepsinya tentang penggelapan pajak?
4. Apakah sikap *machiavellian* berpengaruh terhadap persepsinya tentang penggelapan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh religiusitas (intrinsik dan ekstrinsik), nasionalisme, serta sifat *machiavellian* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) berdasarkan pandangan mahasiswa akuntansi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh religiusitas intrinsik, religiusitas ekstrinsik, nasionalisme, dan sifat *machiavellian* terhadap penggelapan pajak ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, yaitu:

1. Manfaat Teori

Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi serta pengetahuan dalam penelitian selanjutnya mengenai faktor dari dalam diri manusia atau faktor internal seperti, religiusitas, nasionalisme serta *machiavellian* terhadap penggelapan pajak berdasarkan pandangan mahasiswa akuntansi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini juga diharapkan untuk menambah kekayaan teori yang telah ada dan dapat menjadi pengembangan ilmu bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak menggunakan TPB (*Theory of Planned Behavior*) sebagai dasar teori. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dan universitas untuk membuat kebijakan yang dapat meningkatkan serta menanamkan sikap etis terhadap terhadap mahasiswa mengenai penggelapan pajak sehingga diharapkan mahasiswa sebagai calon wajib pajak di masa depan dapat menurunkan adanya tingkat penggelapan pajak

serta meningkatkan penerimaan negara melalui pajak sebagai upaya dalam membantu negara mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara dengan melakukan kewajiban pajaknya serta menghindari adanya penggelapan pajak.

